

KEMISKINAN DI LAHAN PASANG SURUT KALIMANTAN SELATAN

M. Djamhuri, Noorginayuwati, Rosita G., dan Rachmadi R.

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan muncul hampir diseluruh pelosok tanah air, utamanya di kawasan lahan marginal, termasuk lahan pasang surut.

Di Kalimantan Selatan, persoalan kemiskinan di lahan pasang surut sangat menonjol. Hasil kajian yang dilakukan oleh kantor Statistik (BPS) bekerjasama BAPPEDA setempat menunjukkan bahwa pada lahan ini diperkirakan masih terdapat 29,3% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan penduduk umumnya terjadi karena masih terbatasnya kemampuan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dikuasai, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur maupun kelembagaan. Akibatnya pendapatan mereka sangat rendah sehingga tidak mampu membeli kebutuhan pokoknya (Mubyarto, 1981).

Paper ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kemiskinan penduduk di lahan pasang surut. Analisis ditekankan pada tingkat kemiskinan itu sendiri, baik mengenai pendapatan per kapita, pengeluaran untuk pangan, kualitas perumahan, keadaan kesehatan maupun tingkat pendidikan. Disamping itu diuraikan juga karakteristik faktor penentu kemiskinan dan alternatif cara penanggulangannya.

Kabupaten Barito Kuala digunakan sebagai fokus pengamatan karena hampir seluruh wilayah kabupaten ini merupakan lahan pasang surut.

PERSPEKTIF KEMISKINAN DI LAHAN PASANG SURUT

1. Pendapatan Perkapita

Lahan pasang surut dicirikan oleh kondisi yang "serba marginal", terutama dari segi kualitas sumber daya alam. Areal tanahnya luas (man/land ratio sangat rendah), tetapi kurang subur, pH rendah dan bahkan kadang-kadang mengandung zat racun yang sangat mengganggu pertumbuhan tanaman. Akibatnya produk-

tivitas tanaman sangat rendah, demikian pula pendapatan yang diperoleh petani. Dengan mengambil sampel Kabupaten Barito Kuala, hasil pengumpulan data melalui studi referensi menunjukkan bahwa di lahan pasang surut Kalimantan Selatan rata-rata pendapatan penduduk sebesar Rp 54.823,48/kap/bln. Angka ini masih lebih rendah dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya, dimana pendapatan mencapai Rp 55.233,4/kap/bln.

Persoalan pokok dalam struktur pendapatan penduduk di lahan pasang surut adalah distribusi pendapatan yang kurang merata, baik distribusi antar golongan, sektoral maupun regional. Pada Tabel 1 terlihat bahwa pada daerah ini terdapat 5,68% rumah tangga yang pendapatan kurang dari Rp 25.000,-/bulan. Angka ini cukup tinggi dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya, yaitu 1,88%. Prosentase rumah tangga yang pendapatannya diantara Rp 25.000,- dan Rp 30.000,- juga cukup tinggi, yaitu 10,76%. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa di daerah ini persoalan penduduk berpendapatan rendah cukup serius.

Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Kelompok Pendapatan (x Rp 1000/bln)	Lahan Pasang Surut (%)	Kalimantan Selatan Umumnya (%)
Kurang dari 25	5,68	1,88
25 - 30	5,18	2,84
30 - 40	5,58	6,57
40 - 50	10,08	12,85
50 - 75	19,69	22,58
75 - 100	21,41	22,31
100 - 150	18,69	17,77
150 - 200	7,36	7,89
200 - 400	4,08	4,24
400 lebih	2,25	1,07
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1988

Ditinjau dari sektor ekonomi, walaupun tersedia lahan yang cukup luas, penduduk yang bekerja di sektor pertanian memperoleh pendapatan paling rendah dibanding sektor-sektor lainnya. Rata-rata pendapatan petani per bulan Rp 116.345,-/rumah tangga, atau Rp 25.970,-/jiwa. Angka-angka ini berturut-turut hanya 78,54 dan 74,16% dari pendapatan per bulan rata-rata kabupaten.

Distribusi pendapatan regional antar kecamatan secara lengkap disajikan pada Tabel 2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Kecamatan Alalak menempati peringkat pertama dalam hal tingginya pendapatan per rumah tangga, sedikitnya

prosentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan besarnya angka gini ratio. Fenomena ini terjadi karena Kecamatan Alalak merupakan "kawasan industri", sehingga walaupun distribusi pendapatan kurang merata tetapi karena pendapatan perkapita tinggi prosentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tetap rendah. Lain halnya dengan kecamatan Kuripan, pendapatan per rumah tangga penduduk di kecamatan ini hanya sebesar Rp 88.373,-/bulan, walaupun pembagian pendapatan cukup merata (Gini ratio = 0,1803) tetapi prosentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan cukup tinggi. Dengan demikian tampak bahwa jumlah penduduk berpendapatan rendah ditentukan secara bersama oleh tingkat pendapatan per kapita dan pemerataan pembagian pendapatan.

Tabel 2. Distribusi Pendapatan Penduduk di Lahan Pasang Surut Kalimantan Selatan, Kasus Kabupaten Barito Kuala.

Kecamatan	Pendapatan per rumah tangga (Rp/bln)	% penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	Gini Ratio
1. Anjir Muara	81.871	26,60	0,18
2. Anjir Pasar	142.619	19,86	0,26
3. Tabukan	133.531	20,86	0,19
4. Belawang	124.798	46,12	0,28
5. Cerbon	128.719	18,23	0,17
6. Kuripan	88.373	34,04	0,18
7. Bakumpai	144.122	32,41	0,24
8. Alalak	399.063	7,00	0,48
9. Barambai	119.749	21,29	0,16
10. Rantau Badauh	125.634	44,16	0,45
11. Mandastana	109.550	12,89	0,13
12. Mekarsari	119.743	30,65	0,16
13. Tabunganen	110.256	18,12	0,21
14. Tamban	158.919	37,33	0,41
Barito Kuala	148.123,41	29,36	0,35

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1988

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa penduduk miskin tersebar hampir diseluruh kecamatan dengan persentase yang berbeda. Persentase tertinggi terdapat di Kecamatan Belawang (46,12%), kemudian diikuti oleh Kecamatan Rantau Badauh (44,16%), Kecamatan Tamban (37,3%), Kecamatan Kuripan (34,04%) dan kecamatan Bakumpai (32,41%).



2. Pengeluaran untuk Pangan

Bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi pangan cukup tinggi pada tingkat pendapatan yang rendah. Pangan merupakan kebutuhan dasar fisiologis yang paling utama, dan oleh karena itu, kebutuhan ini akan dipenuhi lebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya.

Pada Tabel 3 dampak dari tingkat pendapatan yang rendah di lahan pasang surut menyebabkan persentase pengeluaran untuk konsumsi pangan relatif cukup tinggi, sebesar 77,99% (lebih tinggi dibanding Propinsi Kalimantan Selatan). Konsumsi kalori juga cukup tinggi, yaitu 2.103,59 kalori/hari.

Tabel 3. Persentase pengeluaran makanan terhadap seluruh pengeluaran dan rata-rata konsumsi kalori perkapita perhari di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Kalimantan Selatan.

No. Uraian	Lahan Pasang Surut (%)	Kalimantan Selatan Umumnya (%)
1. % pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran.	77,99	71,90
2. Konsumsi kalori/hari		
- di rumah	1.99	1.88
- di luar rumah	0,12	0,20
- seluruhnya	2.10	2.08

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1988

3. Kualitas Perumahan

Kualitas perumahan di lahan pasang surut pada umumnya kurang memenuhi persyaratan kesehatan. Dari luas hunian yang 33,98% rumah tangga penduduk memiliki luas tanah untuk perumahan kurang dari 60 m² dan hanya 25,36% di atas 100 m² (Tabel 4).

Tabel 4. Persentase rumah tangga berdasarkan luas tanah yang ditempati di Kabupaten Barito Kuala dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Luas Tanah	Barito Kuala (%)	Kalimantan Selatan (%)
<20 m ²	0,36	3,33
20 - 59 m ²	33,62	33,40
60 - 99 m ²	40,66	29,56
100 - 200 m ²	21,44	24,08
>200 m ²	3,92	9,63
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan.

Keadaan perumahan penduduk pada umumnya masih sederhana, 45,73% mempunyai luas rumah kurang dari 40 m² dan hanya 5,50 yang luas rumahnya lebih dari 80 m².

Tabel 5. Persentase rumah tangga menurut luas bangunan yang ditempati di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Keterangan	Lahan pasang surut (%)	Kalimantan Selatan Umumnya (%)
<20 m ²	4,82	7,86
20 - 40 m ²	40,91	38,76
40 - 60 m ²	32,76	28,21
60 - 80 m ²	16,01	17,10
>80 m ²	5,50	8,07
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1988

Sebagian besar rumah merupakan milik pribadi (92,43%), 3,39% berstatus rumah dinas, dan 1,61% berupa rumah sewa/kontrak, serta 2,50% berstatus lainnya. Gambaran tentang status tempat tinggal rumah tangga penduduk di lahan pasang surut ini secara lengkap disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Keadaan perumahan menurut status tempat tinggal dan luas bangunan di Kabupaten Barito Kuala dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan

Keterangan	Barito Kuala (%)	Kalimantan Selatan (%)
Milik sendiri	92,43	88,82
Sewa/kontrak	1,61	5,90
Kredit/beli	0,07	0,31
Dinas	3,39	2,71
Lainnya	2,50	2,26
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan.

4. Keadaan Kesehatan

Umumnya penduduk di lahan pasang surut menggunakan sumber air minum dari sungai/danau yang tidak terjamin kebersihannya. Hanya sebagian kecil penduduk yang menggunakan sumber air minum yang lebih sehat (Tabel 7).

Tabel 7. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum yang dipakai di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Keterangan	Lahan pasang surut (%)	Kalimantan Selatan (%)
PAM/PDAM	0,79	13,19
Mata air	-	0,37
Sumur pompa	2,89	0,43
Sumur perigi	4,22	32,88
Sungai/danau	86,71	37,04
Lainnya	5,39	1,09
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1989

5. Tingkat Pendidikan

Indikator lainnya yang menggambarkan tingkat kemiskinan penduduk adalah tingkat pendidikan. Pada Tabel 8 terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di lahan pasang surut umumnya lebih rendah dibanding Propinsi Kalimantan Selatan umumnya. Proporsi penduduk yang tidak/belum bersekolah dan tidak/belum tamat SD masih cukup tinggi, masing-masing sebesar 29,24 dan

45,60%. Untuk Propinsi Kalimantan Selatan kedua angka ini hanya 23,63 dan 39,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di wilayah ini relatif ketinggalan dibanding daerah lainnya.

Tabel 8. Struktur penduduk menurut pendidikan di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Keterangan	Barito Kuala (%)	Kalimantan Selatan (%)
Tidak/belum sekolah	29,24	23,63
Tidak/belum tamat SD	45,60	39,50
Tamat SD	17,04	23,19
Tamat SLTP	4,58	7,30
Tamat SLTA	3,27	5,78
Tamat Akademi	0,17	0,35
Tamat Universitas	0,10	0,25
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1988

III. FAKTOR PENENTU KEMISKINAN

1. Sumberdaya Alam

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lahan pasang surut masih dalam "kondisi marginal", sehingga daya dan hasil gunanya sangat terbatas. Hal ini mendorong penduduk untuk tidak menggunakan lahan ini secara maksimal. Tabel 9 menunjukkan bahwa pada kawasan ini lahan yang dimanfaatkan untuk sawah beririgasi teknis dan setengah teknis belum ada. Sawah berpengairan sederhana, seluas 2.275 ha, atau 2,37% dari luas sawah seluruhnya. Yang paling dominan adalah sawah pasang surut, dengan luasan mencapai 77.571 ha. Rendahnya pendayagunaan lahan pasang surut ditandai pula oleh masih banyaknya sawah yang sementara tidak diusahakan, ditaksir seluas 15.824 ha, atau 16,54% dari luas sawah yang ada.

Tabel 9. Luas tanah menurut jenis penggunaannya di Kabupaten Barito Kuala dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis penggunaan	Barito Kuala (ha) (*)		Kalimantan Selatan (ha) (*)	
Tanah Sawah :		98.506		503.823
1. Irigasi teknis	-	-	8.540	9.751
2. Irigasi 1/2 teknis	-	-	3.811	3.829
3. Irigasi sederhana	2.275	-	10.402	9.345
4. Irigasi non PU	-	-	11.246	10.762
5. Tadah Hujan	-	-	112.037	141.585
6. Pasang Surut	77.571	83.928	129.874	138.364
7. Tanah sawah lebak	-	-	47.717	64.997
8. Tanah sawah yang tidak diusahakan	15.824	14.578	100.609	125.190
Tanah kering :		200.569		3.194.727
1. Tanah untuk bangunan	15.218	15.742	90.454	122.166
2. Tegall/kebun rakyat	15.160	9.683	279.280	145.801
3. Padang rumput	17.000	11.012	-	151.620
4. Rawa-rawa	34.905	24.922	-	425.567
5. Kolam/Tambak/empang	35.000	192	9.661	9.855
6. Tanah kering yang tidak diusahakan	5.971	4.111	243.410	187.404
7. Ladang/huma	1.084	-	-	121.039
8. Tanah yang ditanami kayu-kayuan	30.066	29.402	1.979.764	-
9. Hutan negara	79.657	41.775	-	517.930
10. Perkebunan	10.430	12.082	249.165	289.068
11. Lain-lain	11.483	51.648	-	921.247
Jumlah	204.026	299.075	3.291.482	3.698.550

Sumber : 1. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Barito Kuala

2. Laporan Tahunan Dinas 1990/91. Sub Dinas Bina Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Selatan

*) Laporan Tahunan Dinas 1992/93. Sub Dinas Bina Program Diperta Tk I Kalimantan Selatan.

Kesuburan tanah umumnya sangat rendah, menunjukkan bahwa dibanding dengan sawah tadah hujan, kandungan unsur N, K, dan bahan organik dalam tanah lebih tinggi, tetapi kandungan unsur P, Ca dan Mg jauh lebih rendah. Disamping itu pH tanah di lahan pasang surut juga lebih rendah, menunjukkan bahwa kesuburan tanah di lahan pasang surut relatif lebih rendah dari sawah tadah hujan.

Tabel 10. Hasil analisa tanah di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan lahan tadah hujan

Indikator	L a h a n	
	Pasang Surut	Tadah Hujan
pH	3,938	5,186
EC (mm/hos/cm)	415,470	-
N (%)	0,222	0,121
C-org (%)	8,826	2,160
P (pp)	1,160	3,230
K (me/100 g)	0,263	0,137
Ca (me/100 g)	0,860	9,339
Mg (me/100 g)	1,732	4,661
Al (me/100 g)	10,500	1,885
KTK (me/100 g)	37,680	19,11

Sumber : Laporan Tahunan Dinas 1990/1991. Sub Dinas Bina Program Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Selatan

Kandungan unsur hara yang rendah dan pH yang jauh dibawah netral mengisyaratkan bahwa tata air (water management) mutlak perlu dilakukan di lahan pasang surut. Disamping itu, untuk meningkatkan kesuburan tanah perlu dilakukan diversifikasi usahatani.

2. Sumber daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia disuatu wilayah dapat dilihat dari struktur umur, kegiatan utama dan tingkat pendidikan penduduk. Tabel 11 menunjukkan, bahwa dibanding Kalimantan Selatan pada umumnya struktur penduduk di lahan pasang surut hampir sama. Penduduk berumur 13 tahun keatas sudah mampu bekerja, 65,86% penduduk berstatus angkatan kerja. Ini berarti setiap satu orang angkatan kerja mampu menghidupi 1,52 penduduk (termasuk dirinya sendiri). Struktur demikian menunjukkan bahwa sumber daya manusia di lahan pasang surut secara kuantitas cukup baik, dan tingkat ketergantungan (dependence level) penduduk rendah.



Tabel 11. Struktur penduduk berdasarkan umur di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Kalimantan Selatan.

Kelompok Umur	Penduduk (%)	
	Barito Kuala	Kalimantan Selatan
< 5 th	13,96	13,23
5 - 6 th	2,83	2,66
7 - 12 th	18,35	17,11
13 - 15 th	7,57	7,46
16 - 18 th	8,21	6,74
19 - 26 th	14,07	14,90
> 27 th	36,01	37,90
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Selatan.

Struktur penduduk secara kuantitatif dianggap mencukupi, namun sumber-daya manusia yang cukup besar tersebut tidak ditunjang oleh pendidikan yang memadai. Di lahan pasang surut tingkat pendidikan penduduk pada umumnya masih rendah, 15,79% yang berumur 10 tahun keatas tidak pernah bersekolah, 50,15% tidak tamat SD, 23,11% tamat SD, dan SLTP keatas. Kondisi ini jauh lebih buruk dibanding tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah hanya 11,09%, tidak tamat SD sebesar 40,54% dan tamat SD 30,11%. (Tabel 12).

Tabel 12. Distribusi penduduk berumur sepuluh tahun keatas menurut pendidikan di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Tingkat Pendidikan	Penduduk (%)	
	Lahan Pasang Surut	Kalimantan Selatan Umumnya
1. Tidak/belum pernah bersekolah	15,79	11,09
2. Tidak tamat SD	50,15	40,54
3. Tamat SD	23,11	30,11
4. Tamat SLTP	6,09	9,62
5. Tamat SLTA	4,53	7,86
6. Tamat Akademi	0,23	0,44
7. Tamat Universitas	0,10	0,32
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Selatan

Kualitas sumberdaya manusia dalam suatu kelompok masyarakat dapat juga ditinjau dari kegiatan utama penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Kualitas sumberdaya manusia semakin tinggi apabila jumlah yang kegiatan utamanya bekerja lebih besar. Tabel 13 menunjukkan bahwa pada lahan pasang surut 55,24% penduduk kegiatan utamanya adalah bekerja, lainnya : masih sekolah (23,05%), mengurus rumah tangga (13,25%), sementara yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan 0,35%. Dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya struktur penduduk ini lebih baik, persentase yang bekerja lebih banyak dan yang hanya mengurus rumah tangga lebih sedikit.

Tabel 13. Distribusi penduduk berumur sepuluh tahun keatas menurut kegiatan utama di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan Utama	Penduduk (%)	
	Lahan Pasang Surut	Kalimantan Selatan Umumnya
1. Bekerja	55,24	50,94
2. Sementara tidak bekerja	1,67	1,55
3. Mencari pekerjaan	0,35	0,45
4. Sekolah	23,05	24,74
5. Mengurus rumah tangga	13,12	15,13
6. Lainnya	6,57	6,68
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Selatan

3. Prasarana Ekonomi dan Sosial

3.1. Prasarana Pendidikan

Kualitas sumberdaya manusia berkaitan erat dengan ketersediaan prasarana pendidikan. Tabel 14 memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan keadaan prasarana pendidikan di lahan pasang surut berada dibawah rata-rata Propinsi Kalimantan Selatan, baik jumlah sekolah, ruang kelas maupun jumlah guru. Jumlah sekolah TK, SD, SMP dan SMA di lahan ini masing-masing 24,255, 23 dan 5 buah, yang jumlahnya jauh lebih kecil dari rata-rata Propinsi. Jumlah guru TK, SD, SMP dan SMA adalah 41, 1.702, 338 dan 103 orang. Hal ini menunjukkan prasarana pendidikan di lahan pasang surut perlu ditingkatkan, baik prasarana sekolah, maupun sumber daya manusianya.

Tabel 14. Prasarana pendidikan di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Prasarana	Barito Kuala		Kalimantan Selatan	
	1989	1993	1989	1993
1. Jumlah sekolah				
TK	24	-	77	802
SD	255	269	294	2.986
SMTP	23	27	29	280
SMTA	6	5	15	132
2. Ruang/bilik				
TK	58	-	137	1.362
SD	1.590	1.605	1.758	18.042
SMTP	74	130	182	1.802
SMTA	31	27	112	1.227
3. Jumlah guru				
TK	41	-	179	1.881
SD	1.702	1.687	1.993	21.369
SMTP	338	312	513	4.877
SMTA	116	103	266	3.612
4. Jumlah murid				
TK	783	-	2.604	26.543
SD	33.358	32.097	36.750	371.242
SMTP	3.801	3.917	6.370	58.886
SMTA	1.012	843	6.746	40.809

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi juga oleh ketersediaan fasilitas komunikasi. Semakin banyak fasilitas komunikasi yang tersedia (semakin besar kesadaran penduduk akan informasi), sehingga pengetahuan dan ketrampilan mereka semakin tinggi. Di lahan pasang surut fasilitas komunikasi cukup memadai (Tabel 15). Yang kurang memadai adalah pengorganisasian penduduk kedalam kelompok-cakir dan jumlah koran masuk desa. Di lahan ini koran masuk desa hanya 1.245 eksemplar, padahal Kalimantan Selatan pada umumnya 2.576 eksemplar. Hal ini mengakibatkan informasi yang diterima sangat terbatas.

Tabel 15. Fasilitas komunikasi di Kabupaten Barito Kuala dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Fasilitas	Barito Kuala	Kalimantan Selatan
1. TV Umum	250	243
2. Sambungan telpon	97	-
3. Kantor Pos :		
Jumlah Kantor Pos	1	1,1
Kantor pos pembantu	7	6,5
Rumah Pos	1	5,4
Pos Desa Keliling	3	-
4. Kelompencapir :		
Jumlah	161	206
Anggota	3849	4753
5. Radio Swasta	-	1,7
6. Koran masuk desa (exp)	1245	2576

Sumber : Kabupaten Barito Kuala dalam Angka.

3.2. Kesehatan

Prasarana penting lainnya yang sangat menentukan kualitas sumber daya dan kesejahteraan hidup manusia adalah ketersediaan fasilitas kesehatan termasuk sanitasi. Di lahan pasang surut ketersediaan fasilitas kesehatan cukup memadai (Tabel 16). Yang masih menjadi persoalan besar adalah air minum. Di lahan ini jumlah pelanggan air minum hanya 704 KK, produksi air minum sebesar 162.627 m^3 , sedang penggunaannya mencapai 111.719 m^3 , atau 68% dari jumlah produksi. Persoalan air minum perlu mendapatkan perhatian serius, sebab pada umumnya penduduk menggunakan air sungai yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Tabel 16. Fasilitas kesehatan/sanitasi di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Fasilitas	Lahan Pasang Surut		Kalimantan Selatan umumnya	
	1989	1993	1989	1993
1. Jumlah RSU	1	1	2	11
2. Puskesmas	15	16	16	185
3. Puskesmas pembantu	55	60	41	525
4. Dokter	12	20	22	301
5. Paramedis	168	198	330	243
6. Klinik KB	18	20	20	254
7. Air minum :				
- Jumlah pelanggan	704	1.076	4.360	57.235
- Produksi (m^3)	162.627	351.501	2.247.425	21.561.475
- Penggunaan (m^3)	111.719	331.756	124.020	16.259.504

Sumber : Kabupaten Barito Kuala dalam Angka, 1989 dan 1993.

3.3. Energi listrik

Fasilitas yang masih jauh dari memadai terutama adalah energi listrik dan fasilitas transportasi. Pada Tabel 17 terlihat bahwa di lahan ini banyaknya pelanggan listrik hanya 1.186 orang, padahal Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya mencapai 17.047 orang. VA terpasang, KWH dibandingkan dan KWH terjual berturut-turut sebesar 716.165 VA, 1.052.130 KWH dan 1.015.980 KWH, atau hanya 3,55%, 2,90% dan 3,18% dibanding Kalimantan Selatan pada umumnya.

Tabel 17. Energi listrik di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Fasilitas	Lahan Pasang Surut		Kalimantan Selatan umumnya	
	1989	1993	1989	1993
Pelanggan listrik	1.186	1.843	17.047	255.161
VA terpasang	716.165	1.128.465	20.188.332	271.796.698
KWH dibangkitkan	1.052.130	1.793.109	36.270.532	42.366.046
KWH terjual	1.015.980	1.684.067	31.898.465	457.633.136

Sumber : Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka, 1989 dan 1993.

3.4. Fasilitas transformasi

Kondisi fasilitas transformasi kurang memadai. Alat transportasi yang paling dominan adalah kendaraan air. Fasilitas transportasi darat masih sangat terbatas, jalan negara tidak ada, yang paling banyak jalan kabupaten (86,27%), sisanya berupa jalan propinsi. Permukaan jalan sebagian besar berupa tanah (61,37%), dan hanya 24,57% yang sudah diaspal. Oleh karena itu hanya 4,57% jalan yang tergolong mantap, semuanya termasuk jalan kelas V. Dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya kondisi fasilitas transportasi ini berbeda jauh, dimana rata-rata terdapat 56,67 km jalan negara, dan 70,86 jalan propinsi (Tabel 18).

Tabel 18. Fasilitas transportasi di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Fasilitas	Lahan Pasang Surut		Kalimantan Selatan Umumnya	
	1989	1993	1989	1993
1. Kendaraan air (buah) 1943		985	148	2581
2. Panjang jalan menurut status wewenang :				
- Negara (km)	-	-	56,67	566,71
- Propinsi (km)	70,10	70,10	70,86	708,63
- Kabupaten (km)	440,83	565,02	457,16	5329,71
3. Panjang jalan menurut jenis permukaan :				
- Aspal (km)	125,56	20,00	213,93	1015,64
- Krikil (km)	72,34	50,00	158,48	252,60
- Tanah (km)	313,03	7,10	216,32	7,10
4. Panjang jalan menurut kondisi jalan :				
- Mantap (km)	7,98	83,40	130,93	1656,279
- Tak mantap (km)	166,36	170,28	249,15	1580,324
- Kritis (km)	336,59	311,34	225,13	2156,116
5. Panjang jalan menurut kelas :				
- Kelas I (km)	-	-	60,87	23,950
- Kelas II (km)	-	-	2,10	24,320
- Kelas III (km)	-	183,78	81,44	905,581
- Kelas IIIa (km)	-	71,00	19,33	1017,485
- Kelas IV (km)	-	-	137,05	914,935
- Kelas V (km)	70,10	-	74,1	1517,640
- Kelas tidak dirinci (km)	-	310,24	-	988,808

Sumber : Kalimantan Selatan dalam angka, 1989 dan 1993.

4. Kelembagaan dan Kebijakan

4.1. Kelembagaan ekonomi

Kelembagaan terpenting yang menunjang kesejahteraan penduduk adalah kelembagaan ekonomi pedesaan dalam wujud kelompok tani dan koperasi. Kelompok tani dianggap sebagai suatu unit pelaku ekonomi yang mengurus distribusi sarana produksi, pemasaran hasil, penyediaan modal dan kredit.

Di Kabupaten Barito Kuala terdapat 773 kelompok tani, 5 BRI Unit Desa, 24 KUD, 11 Kios Sarana Produksi dan 9 Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) (Tabel 19). Untuk menampung kegiatan ekonomi pedesaan maka jumlah lembaga ekonomi pedesaan ini masih jauh dari memadai, terutama jumlah BRI, Kios

Sarana Produksi dan TPK. Jumlah kelompok tani dan KUD sudah hampir seimbang dengan rata-rata Kalimantan Selatan.

Tabel 19. Kelembagaan ekonomi pedesaan di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis kelembagaan	Lahan Pasang Surut		Kalimantan Selatan	
	1990	1992	1990	1992
1. Kelompok Tani	773 (17,61)	807	8545 (20,81)	9031
2. BRI Udes	5 (0,11)	5	55 (0,13)	63
3. KUD	24 (0,55)	34	235 (0,57)	380
4. Kios Saprodi	11 (0,25)	11	327 (0,79)	327
5. TPK	9 (0,20)	9	348 (0,85)	348
6. Puskud	-	-	6 (0,02)	6

Sumber : Laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 1990 dan 1992.

Angka dalam kurung menunjukkan persentase tingkat pelayanan

BRI Unit Desa, Kios Sarana Produksi dan TPK merupakan Lembaga-lembaga ekonomi yang sangat vital untuk menunjang kegiatan ekonomi pedesaan. Di Kabupaten Barito Kuala jumlah ketiga lembaga tersebut per 1.000 petani berturut-turut hanya 0,11; 0,25 dan 0,20, yang berarti setiap lembaga harus melayani 9.090; 4.000 dan 5.000 orang petani. Angka ini sangat tinggi dibanding rata-rata Kalimantan Selatan pada umumnya, yang hanya 769;1.754; dan 1.176 orang petani.

Lembaga ekonomi yang juga penting untuk menunjang kegiatan ekonomi pedesaan adalah koperasi. Di Kabupaten Barito Kuala terdapat 51 koperasi, terdiri atas 23 KUD dan 28 koperasi primer Non KUD. Jumlah anggota KUD tercatat sebesar 11.231 orang. Dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya perkembangan koperasi di wilayah ini cukup baik, di Kalimantan Selatan hanya terdapat 226 buah KUD dan 67 buah koperasi Non KUD (Tabel 20).

Tabel 20. Banyaknya koperasi, anggota dan jumlah simpanan di lahan pasang surut, dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Uraian	Barito Kuala		Kalimantan Selatan	
	1990	1993	1990	1993
1. KUD				
- Jumlah (buah)	23	25	226	265
- Anggota (orang)	7.955	8.695	66.550	85.775
- Simpanan (x Rp. 1.000)	65.687	127.469,2	4.127.548	1.785.028,2
2. Non KUD				
- Jumlah (buah)	28	35	67	778
- Anggota (orang)	3.276	6.526	10.205	127.505

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka, 1990 dan 1993.

4.2. Kelembagaan Penyuluhan

Kelembagaan Penyuluhan memiliki arti yang sangat penting bagi petani, seperti disajikan pada Tabel 21, di lahan pasang surut terdapat 4 orang PPS, 122 orang PPL, 6 buah KWBPP dan 75 buah WKPP. Lembaga penyuluhan ini diharapkan dapat melayani kebutuhan informasi teknologi pertanian untuk 43.886 petani yang terhimpun dalam 773 kelompok tani. Keberadaan lembaga penyuluhan ini secara kualitatif cukup memadai, sebab tiap 1 PPL rata-rata hanya membina 6-7 kelompok tani, atau sekitar 360 orang petani.

Tabel 21. Keadaan kelembagaan penyuluhan di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Uraian	Lahan Pasang Surut	Kalimantan Selatan
1. PPS	4 (0,0911)	82 (0,1997)
2. PPL	122 (2,7799)	1257 (3,0617)
3. KWBPP	6 (0,1367)	40 (0,0974)
4. WKPP	75 (1,7090)	711 (1,7318)
5. Kelompok Tani	773 (17,614)	8.545 (20,814)
6. Kontak Tani	638 (14,538)	6.751 (16,444)
7. Tani Biasa	15.018 (342,20)	245.453 (597,87)
8. KK Tani	43.886 (1000,0)	410.549 (1000,0)

Angka dalam kurung adalah rasio per 1.000 orang petani.

Sumber : Laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 1990.

Mengenai struktur kelompok tani, Tabel 22 menunjukkan bahwa di lahan pasang surut 78,01% kelompok tani masih berstatus pemula, lainnya berstatus lanjut (17,59%) dan madya (4,14%). Dari 773 kelompok tani hanya 2 kelompok

yang berstatus utama. Dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya kondisi kelompok tani ini sangat memilukan, sebab untuk rata-rata propinsi hanya 55,88% kelompok tani yang masih berstatus pemula, lainnya berstatus lanjut (32,49%), madya (8,26%) dan utama (1,40%). Oleh karena itu dukungan fasilitas dan pembinaan petugas lapang perlu ditingkatkan agar hasil kerjanya lebih baik. Tanpa dukungan fasilitas yang cukup dan pembinaan intensif mustahil program penyuluhan akan berhasil, karena secara geografis lahan pasang surut memiliki medan yang berat.

Tabel 22. Kemampuan kelompok tani di lahan pasang surut dan perbandinganannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Uraian	Lahan Pasang Surut	Kalimantan Selatan
1. Pemula	603 (78,01)	4.775 (55,88)
2. Lanjut	136 (17,59)	2.776 (32,49)
3. Madya	32 (4,14)	706 (8,26)
4. Utama	2 (0,26)	120 (1,40)
5. Belum dikukuhkan	-	168 (1,97)
Jumlah	773 (100,0)	8.545 (100,0)

Angka dalam kurung adalah prosentase terhadap jumlah kelompok tani

Sumber : Laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 1990.

Mengenai kelembagaan pengairan, di lahan pasang surut, satu-satunya lembaga yang mengurus pengairan di lahan pasang surut adalah Persatuan Petani Pemakai Air (P3A). Lembaga ini berfungsi :

- (1) mengatur pembukaan dan penutupan pintu air,
- (2) melakukan pemupukan bersama,
- (3) melakukan gotong royong pembersihan parit, dan
- (4) melakukan penyaluran saprodi

Yang tak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk pedesaan adalah kebijakan pertanian, dan yang paling menonjol adalah kebijakan intensifikasi. Tabel 23 menunjukkan bahwa dalam hal intensifikasi padi, Kabupaten Barito Kuala belum mendapatkan perhatian sepenuhnya. Pada MT 90 luas areal Insus Paket D hanya 26 ha, atau 0,10% dari yang ditargetkan, pada hal Propinsi Kalimantan Selatan realisasinya mencapai 3.237 ha, atau 32,30% dari target. Pada MT 1990/91 realisasi Insus Paket D meningkat menjadi 306 ha (12,40%) tetapi Kalimantan Selatan realisasinya mencapai 22.126 ha, atau 97,5%. Kebijakan intensifikasi yang proporsional dengan Propinsi Kalimantan Selatan adalah Insus Paket A, B dan C.

Tabel 23. Realisasi intensifikasi padi Kabupaten Barito Kuala dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Uraian	Barito Kuala	Kalimantan Selatan
1. Insus Paket D		
MT 1990	26 (0,10)	3.237 (32,30)
MT 1990/91	306 (12,40)	22.126 (97,50)
2. Insus Paket A, B, C		
MT 1990	10.990 (151,59)	55.751 (157,48)
MT 1990/91	8.295 (135,78)	80.333 (100,09)

Angka dalam kurung adalah prosentase terhadap target.

Sumber : Laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 1990.

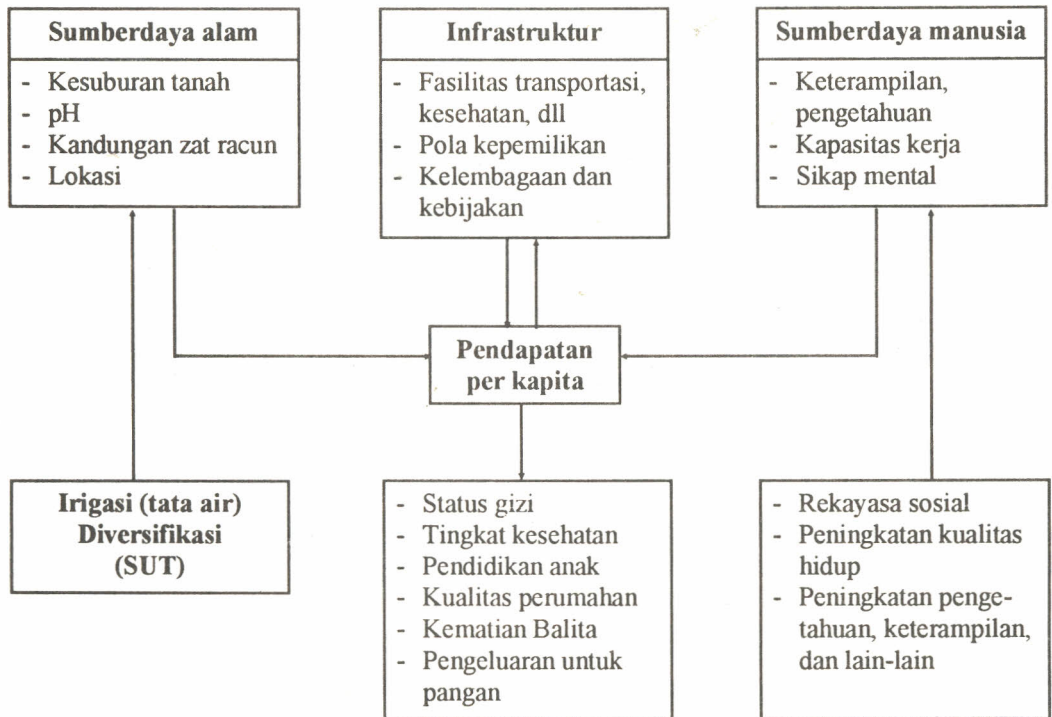
Berdasarkan kriteria efisiensi, tindakan meletakkan prioritas intensifikasi usahatani padi di luar lahan pasang surut dapat dibenarkan, mengingat intensifikasi pada lahan ini lebih sulit. Tetapi kebijakan ini perlu ditinjau kembali mengingat di lahan pasang surut usahatani padi merupakan sumber pendapatan utama penduduk, yang sebagian besar hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Jadi dalam penerapan prioritas intensifikasi usahatani padi perlu didasarkan atas kriteria efisiensi dan kriteria pemerataan pendapatan secara seimbang.

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Hasil pengamatan mengenai sumberdaya dan infrastruktur daerah miskin dan implikasinya terhadap kemiskinan penduduk di lahan pasang surut, sebagaimana diuraikan diatas, menunjukkan bahwa pada kawasan ini persoalan kemiskinan menuntut pemecahan segera. Persoalan kemiskinan muncul sebagai akibat keterbatasan penduduk untuk menguasai dan mengalokasikan lahan secara optimal. Akibatnya pendapatan mereka masih berada dibawah kebutuhan pokok minimal (basic minimum need), sehingga mereka tidak mampu melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau membangun infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan pada masa mendatang.

Siklus yang mengarah kepada kemiskinan yang lebih parah ini dapat dipotong dengan meningkatkan kemampuan penduduk untuk menguasai dan mengalokasikan lahan secara optimal. Salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah melalui introduksi teknologi tata air (water management) dan diversifikasi usahatani yang dilaksanakan secara komprehensif dan dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi sosial ekonomi penduduk miskin tersebut. Se-

cara ringkas alternatif pendekatan untuk meningkatkan penduduk berpendapatan rendah ini disajikan pada Gambar 6.



Gambar 3. Pendekatan alternatif penanggulangan kemiskinan penduduk di lahan pasang surut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tata air satu arah aliran cukup baik untuk diterapkan untuk mendukung diversifikasi usahatani di lahan pasang surut. Dengan model tata air ini proses pencucian tanah dari zat racun tanah lebih lancar dan keasaman tanah dapat diturunkan hingga mendekati pH optimal.

Salah satu strategi diversifikasi usahatani yang dapat digunakan adalah melalui introduksi pola usahatani terpadu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Proyek SWAMP II menunjukkan bahwa pola usahatani sistem surjan yang mengkombinasikan tanaman semusim (padi dua kali setahun dan palawija), tanaman keras dan ternak dapat memberikan pendapatan petani yang cukup tinggi. Di lahan pasang surut sulfat masam pola usahatani ini dapat memberikan pendapatan sebesar Rp 1.424.585,- per tahun atau Rp 4.316,- per HOK, pada hal pola usahatani petani pada waktu yang sama hanya memberikan pendapatan

sebesar Rp 607.865,-. Di lahan pasang surut bergambut hasilnya lebih tinggi lagi, yaitu Rp 1.564.950,- per tahun, namun karena jumlah tenaga kerja yang digunakan lebih banyak, pendapatan per HOK lebih rendah dibanding di lahan pasang surut sulfat masam.

Upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui perbaikan tata air dan diversifikasi usahatani harus didukung oleh rekayasa sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka, baik rekayasa sosial ekonomi untuk mendukung program peningkatan pendapatan tersebut maupun rekayasa sosial ekonomi untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Rekayasa sosial ekonomi yang sangat diperlukan untuk mendukung perbaikan tata air dan diversifikasi usahatani antara lain: penyediaan input atau sarana produksi secara lokal, pe-ningkatan tenaga, sarana dan sarana penyuluhan, penyediaan modal usaha, pembinaan kelompok tani, peningkatan efisiensi pemasaran dan pemberian perangsang produksi bagi petani.

Agar kenaikan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin harus dibarengi dengan bimbingan dan penyediaan prasarana menuju kualitas hidup yang lebih tinggi, misalnya: pembentukan posyandu, PKK, karang taruna, taman gizi, penyediaan air minum yang sehat, peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan dsb.

KESIMPULAN

Walaupun tingkat pendapatan per kapita relatif tinggi, namun oleh karena pembagian pendapatan yang kurang merata, jumlah penduduk miskin di lahan pasang surut Kalimantan Selatan masih cukup besar. Dengan mengambil Kabupaten Barito Kuala sebagai sampel pengamatan, dapat diketahui bahwa jumlah mereka mencapai 29,36%. Pada umumnya mereka adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian atau tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Di lahan ini prosentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi pangan cukup tinggi, yaitu 77,99%. Keadaan perumahan pada umumnya masih sederhana, 45,73% luas bangunannya kurang dari 40 m dan hanya 5,50% yang lebih dari 80 m. Tingkat pendidikan penduduk jauh ketinggalan.

Banyaknya penduduk miskin merupakan resultante dari besarnya pendapatan per kapita dan tingkat pemerataan pembagian pendapatan. Walaupun tingkat pemerataan pembagian pendapatan rendah, apabila tingkat pendapatan tinggi, jumlah penduduk berpendapatan rendah sedikit (Kasus Alalak). Se-



baliknya, walaupun tingkat pemerataan pembagian pendapatan tinggi, jika tingkat pendapatan rendah, penduduk berpendapatan rendah berjumlah besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah penduduk berpendapatan rendah upaya peningkatan dan pemerataan pembagian pendapatan harus dilakukan secara serentak.

Sumber daya dan infrastruktur memegang peranan sangat menentukan dalam upaya untuk mengurangi banyaknya penduduk berpendapatan rendah. Di lahan pasang surut ketersediaan sumberdaya ekonomi ini, untuk jenis tertentu jumlahnya cukup memadai, tetapi kualitasnya masih sangat terbatas. Untuk keperluan pertanian lahan pasang surut masih cukup luas, tetapi masih berada dalam "kondisi marginal", sehingga daya dan hasil gunanya sangat terbatas. Untuk meningkatkannya perlu konservasi dan reklamasi lahan.

Kaitan antara kualitas sumber daya dan infrastruktur dengan pendapatan penduduk ini mengisyaratkan bahwa jumlah penduduk berpendapatan rendah dapat berkurang apabila sumber daya dan infrastruktur yang mereka kuasai ditingkatkan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah melalui perbaikan tata air dan diversifikasi usahatani. Berdasarkan hasil penelitian diversifikasi usahatani dengan menggunakan pola usahatani sistem surjan yang memadukan antara tanaman semusim (padi dua kali setahun dan palawija) dengan tanaman keras dan ternak dapat memberikan pendapatan usahatani yang cukup tinggi. Agar lebih berhasil upaya peningkatan pendapatan tersebut harus didukung oleh seperangkat rekayasa sosial ekonomi, baik untuk mendukung upaya peningkatan sumber daya tersebut maupun untuk membimbing penduduk berpendapatan rendah meningkatkan taraf hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Selatan, 1992. Laporan Tahunan Dinas 1990/91. Banjarbaru.
- Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Selatan, 1989^{a)}. Kalimantan Selatan Dalam Angka, Banjarbaru.
- Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Selatan, 1989. Pola Pengeluaran Penduduk Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
- Mubyarto, 1981. Program Pemerataan. Tujuan dan Pengalaman. Dalam: Politik Pertanian. Yayasan Obor. Jakarta.

- Rachmadi Ramli, R. Smith Simatupang dan Isdijanto Ar Riza, 1990. Penelitian Sistem Usahatani di Lahan Pasang Surut Sulfat Masam, Terantang, Kalimantan Selatan. Prosiding Seminar Penelitian Lahan Pasang Surut dan Rawa SWAMP II, 1990. Palembang, 29-31 Oktober 1990.
- Supriyo A., B. Prayudi, Sudirman U., Rina Y. dan Isdijanto, 1990. Penelitian Pengembangan Sistem Usahatani pada Lahan Bergambut di Sakalagun, Kalimantan Selatan. Prosiding Seminar Penelitian Lahan Pasang Surut dan Rawa SWAMP II, 1990. Palembang, 29-31 Oktober 1990.